



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

A. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 71,00 dan tahun 2023 sebesar 71,63 dengan perubahan sebesar 0,63%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2022 – 2023**

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Harapan Hidup	69,28	69,45	
Rata-rata Lama Sekolah	8,02	8,03	
Harapan Lama Sekolah	13,30	13,50	
IPM	71,00	71,63	1,008%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

B. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 9,43 persen dan tahun 2023 sebesar 9,65 persen dengan perubahan sebesar 1,02%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Kemiskinan %	9,43	9,65	1,02%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini masih menjadi target dan upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah sehingga dapat menekan angka kemiskinan kedepannya. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

C. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas

tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebesar 5,04% dan pada tahun 2023 sebesar 3,64% dengan perubahan sebesar 0,72%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Angka Pengangguran Kabupaten Maros Tahun 2022 – 2023

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Angka Pengangguran %	5,04	3,64	0,72%.

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

D. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yakni 9,13% dan pada tahun 2023 sebesar 5,00 persen dengan perubahan sebesar 0,54%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Pertumbuhan Ekonomi %	9,13	5,00.	0,54%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

E. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2022 PDRB perkapita sebesar 58,55 dan terakhir pada tahun 2023 sebesar 64,69 yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren peningkatan yang positif.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**PDRB Perkapita Tahun 2022-2023
Kabupaten Maros**

Uraian	2022	2023	Perubahan %
Nilai PDRB (Juta Rp.)	23.544.300	26.389.000	
Jumlah Penduduk (jiwa)	391.489	410.699	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	58,55	64,69	1,10%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

F. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2022 sebesar 0,362 dan tahun 2023 sebesar 0,372 dengan perubahan sebesar 1,027%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2022 – 2023**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2022	2023	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,362	0,372	1,027%

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Maros, 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

2.1. URUSAN PENDIDIKAN

A. CAPAIAN KINERJA OUTCOME

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada tahun 2023 berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,22 %	96,28 %
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	102,80 %	105,66 %
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	108,66%	103,06 %
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar **Rp. 453.410.896.057** dan terealisasi sebesar **Rp. 70.753.507.194** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pendidikan Anak Usia Dini	8.533.781.000	7.771.276.944	91,06	APBD
2	Pendidikan Dasar	60.290.352.900	59.787.160.426	99,17	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	4.812.850.000	3.195.069.824	66,39	APBD
Total Anggaran SPM		73.636.983.900	70.753.507.194	96,08	
Total Anggaran PD		453.410.896.057	415.919.725.977	91,73	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		0	17,01		

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros , 2023

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan
1.	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum tersedianya data By Name By NIK • Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi • Adanya perbedaan data dari beberapa Indikator
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Maksimalnya Sasaran Pengampu SPM • Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by adress • Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD • Perhitungan kebutuhan penanganan sosial bagi anak putus sekolah belum memadai
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal • Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah

No	Tahapan	Permasalahan
		• Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah / lokasi pemenuhan
	Pelaporan	
	Lain-lain	

2.2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2023 berdasarkan indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,073%	1,2761%
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	101,57%	100%
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	102,33%	100%
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	196,12%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72,88%	100%
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133,75%	100%
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55,93%	100%

	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	63,72%	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36,48%	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,38%	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94,48%	94,48%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95,18%	100%
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,64%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar **Rp. 177.610.222.326** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.364.121.699	1.181.855.000	86,64	DAU dan DAK NF
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	342.919.699	116.260.000	33,90	DAU dan DAK NF
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	9.240.000	0	0,00	DAU
4	Pelayanan kesehatan Balita	511.975.000	267.705.000	52,29	DAK NF
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	555.030.000	531.730.000	95,80	DAK NF

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	302.590.000	259.220.000	85,67	DAK NF
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	355.145.200	295.655.000	83,25	DAK NF
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	0	0	0,00	DAK NF
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	330.388.000	330.294.375	99,97	DAK NF
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	217.080.000	203.620.000	93,80	DAK NF
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	959.370.000	310.420.000	32,36	DAK NF
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	361.590.000	347.070.000	95,98	DAK NF
13	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin)	4.546.583.811	4.507.155.596	99,13	DAU
14	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai)	2.945.726.000	2.846.808.022	96,64	DAK Non Fisik
15	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas)	1.200.360.800	1.198.184.800	99,82	DAK Fisik

16	Dana Pendukung SPM (Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (USG, Antropometri dan Gadar Matneo)	5.870.942.000	5.859.349.400	99,80	DAK Fisik
Total Anggaran SPM		19.873.062.209	18.255.327.193	91,86	DAU dan DAK
Total Anggaran Perangkat Daerah		177.610.222.326			
Persentase Alokasi Anggaran SPM (1 : 2 x 100%)		11,19 %			

C. Permasalahan yang dihadapi

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maros pada Tahun 2023, dapat dilihat pada hasil capaian yang 100%.

2.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh kabupaten Maros pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBERDATA TAHUN 2022	SUMBER DATA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir diWS Kewenangan Kab/Kota	100%	0%
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai diWS Kewenangan Kab/Kota	100%	0%

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81,45%	100%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,61%	98,49%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,65%	100%
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	100%
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	77,10%	77,14%
Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60,57%	85,44%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar **Rp. 231.256.600.540** dan terealisasi sebesar **Rp. 213.522.857.641** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.569.551.000	6.567.545.552	99,97	APBD (DAU)
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik air	1.879.770.000	1.860.560.640	98,98	APBD (DAU)
Total Anggaran SPM		8.449.321.000	8.428.106.192	99,75	APBD (DAU)
Total Anggaran PD		231.256.600.540	213.522.857.641	92,33	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		3,65			

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Adanya perbedaan data pada saat di lapangan	Keakuratan data lapangan
2	Penghitungan Kebutuhan	Kurangnya dokumen perencanaan pendukung dan tidak semua data dasar tersedia serta data cenderung kurang update	Data dasar tersedia
		Belum adanya data base keberfungsian dari sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun	Penyusunan data base keberfungsian sarana prasarana air minum dan sanitasi
3	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum optimalnya system perencanaan penyediaan air minum dan terbatasnya pendanaan untuk penerapan SPM	Perencanaan lebih dioptimalkan berbanding lurus dengan pendanaannya
		Perlunya penganggaran yang cukup besar untuk menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi	Anggaran bidang air minum dan sanitasi di optimalkan
4	Pelaksanaan	Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah	Pelatihan untuk perangkat daerah
		Sarana prasarana bidang sanitasi belum berfungsi secara optimal	Pelatihan untuk kelompok pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi
5	Pelaporan	Format laporan yang selalu berubah-ubah	-
6	Penyiapan Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Untuk anggaran yang direncanakan berbeda dengan realisasinya	Dalam penganggaran kegiatan untuk program pendukung SPM lebih diprioritaskan

2.4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Maros Tahun 2023 berdasarkan Indeks Kinerja

Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA TAHUN 2022	SUMBER DATA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
4	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	0%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	31,4%	60,74%
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	32,82%	32,132%
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Saranadan Utilitas Umum)	1,81%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar **Rp. 9.562.826.086** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.658.743.665** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	100	Provinsi
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	-	-
Total Anggaran SPM		Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	100	

Total Anggaran PD	Rp. 9.562.826.086	Rp. 7.658.743.665		
Persentase Alokasi Anggaran SPM				

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Jauh Sulitnya berkoordinasi dengan Aparat Desa Pengumpulan Data ditingkat Desa Masih Kurang 	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat
2.	Penghitungan Kebutuhan	Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya	Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat
		Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan	Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM.
		Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana	Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa faktor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi. Minimnya sumber daya yang tersedia 	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-

2.5. URUSAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA TAHUN 2022	SUMBER DATA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
		Persentase Perdadadan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
		Jumlah warga negarayang memperoleh layanan informasi rawan bencana	387.984 Orang	398.866 Orang
		Jumlah warga negarayang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	387.984 Orang	41.319 Orang
		Jumlah warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15 Orang	342 Orang
		Persentase Perdadadan Perkada yang ditegakkan	72%	100%
		Waktu tanggap(<i>response time</i>) penanganan kebakaran	13,36 Menit	8,62 Menit

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar Rp. **14.401.931.358** dan terealisasi sebesar Rp. **14.087.398.403** dengan Program/Kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	383,221,392	337,674,000	88.11 %	APBD dan Dana Bagi Hasil
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	510,963,000	488,873,807	95.68 %	APBD
Total Anggaran SPM		894.184.000	826.547.807	92.44%	APBD dan Dana Bagi Hasil
Total Anggaran PD		14.401.931.358	14.087.398.403	97.82%	APBD dan Dana Bagi Hasil
Persentase Alokasi Anggaran SPM		6.21%	5.87%		APBD dan Dana Bagi Hasil

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	<p>a. Tidak tersedianya data (tidak terdokumentasi secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat;</p> <p>b. Kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir;</p>	<p>a. Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal</p>
2.	Penghitungan Kebutuhan	<p>a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;</p> <p>b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor</p> <p>c. Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Damkar masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai).</p>	<p>a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran;</p> <p>b. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	<p>Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;</p>
4.	Pelaksanaan	<p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan trantibumlinmas;</p> <p>b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p>

5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	<p>a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran;</p> <p>b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;</p> <p>d. Biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran masih terpusat di bagian keuangan daerah sehingga dalam pengurusan perbaikan menjadi terhambat</p>	<p>a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran;</p> <p>b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran;</p> <p>c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran;</p> <p>d. Sebaiknya biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran di kelola langsung oleh instansi bersangkutan sehingga proses perbaikan menjadi cepat dan dapat di gunakan apabila terjadi kebakaran</p>

2.6. URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Maros pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SUMBER DATA TAHUN 2022	SUMBER DATA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(indikator SPM)	100%	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi Belanja Urusan Sosial di Kabupaten Maros Tahun 2023 sebesar Rp. **6.964.480.017** dan terealisasi sebesar Rp. **6.721.591.118** dengan Program/Kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	4.191.000	4.191.000	100	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	6.500.000	6.500.000	100	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	8.500.000	8.055.500	98	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	55.941.850	54.785.500	98	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	0	0	0	Bantuan Kemensos
Total Anggaran SPM		75.132.850	73.532.000	98	APBD
Total Anggaran SKPD		6.964.480.017	6.721.591.118	97	APBD
Persentase Alokasi Anggaran SPM		0.10	0.10		

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten

Maros Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Letak Lokasi Jauh, Terkendala Jaringan Seluler Masih Kurang	<ul style="list-style-type: none">- Mengaktifkan Tugas dan Fungsi Fasilitator pada tiap Desa/ Kelurahan- Menambahkan Biara atau Insentif petugas pengumpul data
2.	Penghitungan Kebutuhan	Terbatasnya Pagu Anggaran untuk Memenuhi Indikator Capaian SPM pada DPA	Mengidentifikasi sumber pendanaan yang sah selain dari APBD (CSR dunia usaha, Basnas maupun bantuan dari Provinsi dan Pemerintahan Pusat).
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Belum Terakomodirnya Beberapa Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait (Organisasi social, Dunia Usaha maupun OPD lain).
4.	Pelaksanaan	Terkadang di dapati sasaran / Klien untuk pemenuhan SPM tidak di dukung oleh keluarga/ wali dalam Proses Pemenuhan SPM	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Pendampingan dalam pemberian Pelayanan- Koordinasi dengan Aparat Pemerintah di Desa / Kelurahan
5.	Pelaporan	Pelaksanaan Kegiatan Terkadang tidak sesuai rencana (Jadwal)	Tetap melakukan pelaporan sesuai jadwal meskipun belum ada kegiatan yang di laksanakan.
6.	Lain-lain	Capaian SPM Dinas Sosial tidak Sepenuhnya menggunakan Anggaran APBD Kabupaten. Tetapi sebagian juga di biyai oleh Anggaran APBN / Kemensos RI	Tetap menyusun rencana dan penganggaran pemenuhan SPM dan menjadikannya sebagai Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dalam Penyusunan APBD Kabupaten.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Hasil EPPS Tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja sebesar **3,2762** dan status kinerja “**Sedang**”.

3.2. Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 50.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 Kabupaten Maros berhasil mendapatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tahun 2023 yang berarti pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros terlaksana dengan baik.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (*Unaudited*) Tahun 2023, realisasi pendapatan Kabupaten Maros tahun 2023 mencapai sebesar Rp. **1.510.429.564.952,05** dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 mencapai Rp. **1.521.013.274.022,08**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.485.038.399.072	1.510.429.564.952,05	101,71
4.1	Pendapatan Asli daerah	307.532.402.823	312.458.644.282,03	101,60

4.2	Pendapatan Transfer	20.685.000.000	18.244.987.544,14	88,20
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	10.483.898.863	10.483.898.863	100,00

Sumber : BPKAD, 2024

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5	BELANJA DAERAH	1.604.151.161.593	1.521.013.274.022,08	94,82
5.1	Belanja Operasi	1.054.635.387.549	997.175.843.912,08	94,55
5.2	Belanja Modal	396.480.737.444	371.984.501.307	93,82
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	1.817.892.203	60,60
5.4	Belanja Transfer	150.035.036.600	150.035.036.600	100

Sumber : BPKAD, 2024

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Data Base Inovasi Daerah, Kabupaten Maros memiliki Inovasi Daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Asset Daerah	PAMANDA	Terkirim
2.	Bagian Hukum Setda	KASIHARAPANKEREN	Terkirim
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, perhubungan dan Pertanahan	SIAP JAKI	Terkirim
4.	Badan Pendapatan Daerah	MAKAMAJA	Terkirim
5.	Dinas KOMINFO	SI DATA SERU	Terkirim
6.	Dinas Kesehatan	MAKESSING	Terkirim
		KERETA SAKTI	Terkirim

RLPPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

	SILOGTA KEREN	Terkirim
	CEMANGI	Belum Dinilai
	CEK MAS PADANG	Belum Dinilai
	GERCEP TAS HERMES	Belum Dinilai
	GESIT LIAR	Belum Dinilai
	GESIT MENDEKATIMU	Belum Dinilai
	TANCAP JAROM	Belum Dinilai
	SALOME	Belum Dinilai
	PETIH SADIS	Belum Dinilai
	TERASI DI GOSOK	Belum Dinilai
	EDUKASI TEMUI BUFAS	Belum Dinilai
	P2 TB T4 MASKER	Belum Dinilai
	MC SEHAT	Belum Dinilai
	SANDARAN SI DIA	Belum Dinilai
	CODEINE	Belum Dinilai
	GERTU JANDA	Belum Dinilai/ Uji Coba
	PAKARESO	Belum Dinilai/ Uji Coba
	SI GURAME CEPER	Belum Dinilai/ Uji Coba
	CANTIK BUMILKU	Belum Lengkap

		SI POS MAPAKAINGE	Belum Lengkap
		SIBER TB	Belum Lengkap
		SOSIALISASI IBU PERI	Belum Lengkap
		ADA YUNI DI MAROS BARU	Belum Lengkap
		REMOT TB	Belum Lengkap
		SITA LALENG LISE'	Belum Lengkap
		BORMAS BESPREN	Belum Lengkap
		PAPA BUDE'TA	Belum Lengkap
		META BARIS	Belum Lengkap
		SELALU GOES	Belum Lengkap
		CATINTING	Belum Lengkap
		GOES LA BANG	Belum Lengkap
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OM DUK	Belum Lengkap
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	GENERASI	Belum Dinilai
9.	Dinas Perikanan	PANTAI MAROS	Belum Dinilai
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian	GEMBIRA BERSEKOLAH	Inisiatif
11.	Dinas Pemberdayaan	KLINIK PPRG	Inisiatif

	Perempuan, PA, Pengendalian Penduduk dan KB	WE CARE U	Inisiatif
12.	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Ketenagakerjaan	JEMPOL MANIZ	Belum Dinilai/ Uji Coba
13.	Satpol PP Damkar dan penyelamatan	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA	Inisiatif
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SEKOLAH CERDAS TERINTEGRASI	Belum Dinilai/ Uji Coba



BUPATI MAROS WAKIL BUPATI MAROS
DRIHA SCHAIDIR SYAM, SIP., MH. HJ. SUHARTINA BOHARI, SE

SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
A. DAVID SYAMSUDDIN, S.STP., M.SI HARNA NINGSIH, S.I.P., M.SI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		ANGKA KEMISKINAN		ANGKA PENGANGGURAN		PENDAPATAN PERKAPITA		PERTUMBUHAN EKONOMI		KETIMPANGAN PENDAPATAN	
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
71,00%	71,63%	9,43%	9,65%	5,04%	3,64%	58,31%	64,69%	9,13%	5,00%	0,362%	0,372%

APBD

PENDAPATAN DAERAH

TARGET : Rp. 1.485.038.399.072

REALISASI: Rp. 1.510.429.564.952

BELANJA DAERAH

TARGET : Rp. 1.604.151.161.593

REALISASI: Rp. 1.521.013.274.022

PEMBIAYAAN DAERAH

TARGET : Rp. 119.112.762.521

REALISASI Rp. 119.112.762.521

101,71%

PENDAPATAN DAERAH

94,82%

BELANJA DAERAH

100%

PEMBIAYAAN DAERAH

- ### PRESTASI DAERAH
- Penghargaan dari Kemenkumham RI atas Dukungan Pelayanan Terbaik Keimigrasian 2023
 - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 2023
 - Penghargaan Kementerian Kesehatan RI Bebas Frambusia Tahun 2023
 - Penghargaan atas Target Non Acute Flacid Polio dari Pengelola Imunisasi Kemenkes RI 2023
 - Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Tahun 2023
 - Penghargaan Piala ADIPURA dari Kementerian LH RI Tahun 2023
 - Piagam EPPD 2022 Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri RI
 - Juara Harapan II Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Sulsel Tahun 2023
 - Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023
 - Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya 2023
 - Unesco Global Geopark Maros-Pangkep
 - Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya Tahun 2023
 - Penghargaan Kementerian Kesehatan RI atas STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 2023

OPINI BPK REPUBLIK INDONESIA

2018	2019	2020	2021	2022
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 Kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Biro Pemerintahan Pada Tanggal 28 Maret 2024

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

- Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar: **105,66%**
- Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar: **103,06%**

KESEHATAN

- 100% Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
- 100% Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Persalinan
- 100% Persentase Bayi baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir

PEKERJAAN UMUM

- Persentase Jumlah Rumah tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM: **98,49%**
- Persentase Jumlah Rumah tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik: **100%**
- Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi: **100%**

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

- Hunian untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Maros: **100%**

TRANSTIBUM & LINMAS

- 100% Persentase Gangguan Transtibum yang dapat Diselesaikan
- 8,62 Menit Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

SOSIAL

- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti: **100%**
- Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten Maros: **100%**

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN & PERIKANAN

- 163,79 Ton Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

PARIWISATA

- 198,08% Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara

PERTANIAN

- Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun: **628,50 Ton**

PERDAGANGAN

- Persentase Kinerja Realisasi Pupuk: **84,97%**

PERINDUSTRIAN

- 229,846% Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kab. Maros

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

- 27,98% Persentase Perusahaan yang menetapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

- Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait: **100%**

PANGAN

- Persentase Ketersediaan Pangan: **224,37%**

PERTANAHAN

- 100% Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas LH
88,74	53,64	53,71	67,8%

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

- Perekaman KTP Elektronik: **98,74%**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Persentase Pengentasan Desa Tertinggal: **100%**
- Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri: **330,76%**

PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

- Persentase Pemakaian Kontrasespsi Modern: **62,40%**

PERHUBUNGAN

- V/C Ratio di Jalan Kab. Maros: **0,46%**

KOMUNIKASI & INFORMASI

- Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi: **100%**

KOPERASI & UKM

- Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas: **53,17%**

PENANAMAN MODAL

- 182,2% Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Maros

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- 6 Medali Tk. Nasional Peningkatan Prestasi Olah Raga

STATISTIK

- 100% Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

PERSANDIAN

- 52,40% Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

KEBUDAYAAN

- 98,48% Terlestarikannya Cagar Budaya

PERPUSTAKAAN

- 83,57% Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

KEARSIPAN

- 83,33% Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat